



LAPORAN PENELITIAN  
DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2006

**PEMBERDAYAAN ATAU PEMBEBANAN? DAMPAK KREDIT MIKRO  
UNTUK WANITA DALAM RANGKA PENCANANGAN TAHUN  
KEUANGAN MIKRO INDONESIA 2005**

Peneliti:

**Sulikh Asmorowati, S.Sos., MDev.St.  
Drs. Bintoro Wardiyanto, M.Si.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun 2006  
S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 2264/J03/PG/2006  
Tanggal 12 April 2006  
Nomor urut: 12

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2006

WOMEN IN DEVELOPMENT  
LOCAL FINANCE



LAPORAN PENELITIAN  
DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2006

**PEMBERDAYAAN ATAU PEMBEBANAN? DAMPAK KREDIT MIKRO  
UNTUK WANITA DALAM RANGKA PENCANANGAN TAHUN  
KEUANGAN MIKRO INDONESIA 2005**

Peneliti:

Sulikh Asmorowati, S.Sos., MDev.St.  
Drs. Bintoro Wardiyanto, M.Si.

KKB  
KK-2  
LP26/08  
Asm  
P

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun 2006  
S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 2264/J03/PG/2006  
Tanggal 12 April 2006  
Nomor urut: 12

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2006



**IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

**1. Judul penelitian** : Pemberdayaan atau Pembebanan? Dampak Kredit Mikro untuk Perempuan dalam Rangka Pencanangan Tahun Keuangan Mikro Indonesia 2005

a. Macam Penelitian :  Fundamental  Terapan  Pengembangan

b. Kategori Penelitian :  I  II  III

**2. Kepala Proyek Penelitian**

a. Nama lengkap dan Gelar : Sulikah Asmorowati, S.Sos.MDevSt

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Pangkat/Golongan/NIP : PenataMuda/IIIb/132230971

d. Jabatan sekarang : Lektor

e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Ilmu Sosial&Ilmu Politik(FISIP)/Ilmu Administrasi Negara

f. Univ/Ins/Akademi : Universitas Airlangga

g. Bidang Ilmu yang diteliti : Studi Pembangunan

**3. Jumlah Tim peneliti** : Satu (1)

**4. Lokasi Penelitian** : Surabaya

**5. Kerjasama dengan Instansi lain:** : Tidak ada

a. Nama Instansi : ---

b. Alamat : ---

**6. Jangka Waktu Penelitian** : 5 Bulan

**7. Biaya yang diperlukan** : Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

**8. Seminar Hasil penelitian** :

a. Dilaksanakan tanggal : .....

b. Hasil Penelitian : ( ) Baik sekali (✓) Baik  
( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, .. Oktober 2006



Mengetahui/Mengesahkan  
a.n Rektor

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Airlangga

Prof. Dr. H. Sarmanu, MS  
NIP 130 701 125

## RINGKASAN

### PEMBERDAYAAN ATAU PEMBEBANAN? DAMPAK KREDIT MIKRO UNTUK PEREMPUAN DALAM RANGKA PENCANANGAN TAHUN KEUANGAN MIKRO INDONESIA 2005

#### (EMPOWERMENT OR IMPEDIMENT? THE IMPACTS OF MICRO-CREDIT TARGETTED WOMEN IN ACCORDANCE WITH THE DECLARATION OF THE YEAR OF MICRO FINANCIAL INDONESIA 2005

(Sulikh Asmorowati dan Bintoro Wardiyanto)  
Jurusan Ilmu administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Airlangga, Tahun 2006, 46 halaman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kredit mikro yang menargetkan perempuan bagi para perempuan penerimanya. Fokusnya adalah apakah kredit mikro bagi para perempuan ini mengarah pada pemberdayaan atau sebaliknya justru mengarah pada pembebanan terhadap kaum perempuan yang menjadi kelompok sasarannya, sehingga semakin memperkuat *triple burden of women*, yaitu dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencanangan program aksi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekaligus pencanangan tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro Indonesia. Pencanangan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah atas peran UMKM, yang jumlahnya telah mencapai 42 juta atau 99,85% dari total usaha yang ada di Indonesia.

Sebagai suatu program yang memberikan akses kredit yang lebih luas kepada kaum miskin, kredit mikro telah dianggap sebagai suatu program kunci bagi upaya pemberantasan kemiskinan, mengingat selama ini masyarakat miskin mendapat banyak halangan untuk mengakses sistem atau lembaga perbankan lainnya. Menariknya, akhir-

akhir ini terdapat penekanan akan pentingnya kredit mikro untuk mengatasi kemiskinan dikalangan perempuan dan bahkan kredit mikro telah dianggap sebagai sarana untuk memberdayakan perempuan. Jelasnya, perempuan memegang peranan penting dalam mentransfer kredit mikro ke keluarga mereka. Namun, apakah para perempuan yang menjadi kelompok sasaran atau penerima kredit mikro itu benar-benar diuntungkan atau dalam hal ini diberdayakan? atau sebaliknya dengan menjadi penerima kredit mikro maka para perempuan dengan peran domestiknya justru semakin dibebani.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti berupaya menggambarkan bagaimana dampak kredit mikro untuk perempuan. Populasi penelitian ini adalah perempuan yang menjadi penerima kredit mikro yang dikelola oleh Asosiasi Pendukung Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) Lembaga Widya Darma yang berkantor di Jl. Dukuh Kupang Timur Surabaya. Informan diambil secara purposive. Teknik ini digunakan dengan nalar bahwa kita sudah mengetahui secara jelas kriteria sampel yakni para perempuan penerima kredit mikro. Sampai akhir penelitian, informan berjumlah 22 orang yang terdiri dari 20 perempuan penerima kredit mikro dan 2 orang staf ASPPUK. Data dikumpulkan lewat wawancara secara langsung dengan pedoman wawancara bersifat terbuka. Studi literatur dan teknik observasi juga digunakan untuk mendukung data hasil wawancara. Data-data ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa program kredit mikro, khususnya yang dikelola oleh Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) berkontribusi baik kepada pemberdayaan maupun pembebanan perempuan. Kredit mikro dapat memberdayakan perempuan karena dengan kredit mikro maka akses perempuan terhadap sumber daya personal termasuk akses terhadap pendapatan, dan kerja yang berorientasi pasar. Selain

itu, pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari akses perempuan terhadap sumber daya publik, yaitu akses perempuan terhadap pengambilan keputusan dan pengelolaan pinjaman, serta kontrol perempuan terhadap tubuh mereka, dimana kredit mikro berkontribusi terhadap penurunan tindak kekerasan kepada perempuan.

Namun, kredit mikro juga dapat membebani perempuan penerimanya, karena kredit semacam ini semakin melegitimasi beban ganda perempuan dimana selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, perempuan mempunyai beban untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang seharusnya adalah tanggung jawab kepala keluarga (yaitu suami mereka). Dengan kata lain program seperti kredit mikro ini memfokuskan diri hanya pada satu aspek yaitu problem perempuan untuk mengakses keuangan dan pendapatan keluarga, namun program seperti ini lupa mempertimbangkan bagaimana waktu para perempuan telah sedemikian terbatas untuk aktivitas domestik, sehingga semakin memperkuat *triple burden of women*, yaitu bahwa perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat.

Sebagai saran program kredit mikro yang merupakan upaya atau solusi jangka pendek dan jangka menengah terbaik untuk membantu perempuan yang termarginalisasi, sangat berpotensi untuk mengembangkan kapasitas perempuan untuk bisa mandiri (*self sustainable*). Namun, untuk bisa mencapai tujuan kemandirian itu diperlukan upaya-upaya jangka panjang seperti sosialisasi gender baik untuk kaum perempuan maupun laki-laki untuk mempromosikan kesetaraan gender. Selain itu, Kredit mikro akan mampu memberdayakan perempuan target groupnya jika diikuti dengan aktivitas lanjutan seperti pendidikan/pelatihan baik tentang manajemen dan pengembangan usaha, penguasaan ketrampilan teknis produksi, jaringan pasar, dan lain sejenisnya.

Yang terpenting, dengan mengadopsi pengertian pemberdayaan (*empowerment*) sebagai "ekspansi dari serangkaian pilihan yang ada untuk perempuan, maka jawaban untuk pertanyaan tentang apakah kredit mikro memberdayakan atau sebaliknya justru membebani perempuan akan tergantung sepenuhnya pada pilihan perempuan sebagai individu. Dengan demikian jika seorang perempuan memilih untuk mentransfer kredit yang diperolehnya kepada suaminya, maka dapat dikatakan bahwa perempuan tersebut berdaya karena itulah yang menjadi pilihannya.

Selain itu, penentuan tujuan harus juga menjadi perhatian dalam desain suatu program kredit mikro, sehingga menjadi jelas apakah suatu program kredit mikro harus bertanggung jawab pada pembangunan kapasitas sosial (*social capacity building*), seperti pemberdayaan ataupun hanya melayani kebutuhan keuangan kelompok miskin yang menjadi target group-nya. Jika suatu program kredit mikro hanya bertujuan sebagai institusi finansial untuk memenuhi kebutuhan keuangan kelompok sasarannya, maka tidak perlu memfokuskan diri pada isu sosial yang lebih dalam seperti pemberdayaan, melainkan hanya berfokus pada keberlanjutan finansial (*financial sustainability*). Sebaliknya jika tujuan suatu program kredit mikro adalah untuk membangun kapasitas sosial, maka daripada hanya berkonsentrasi pada aspek ekonomi kemiskinan, program tersebut harus lebih memfokuskan diri pada aspek non ekonomi kemiskinan, seperti upaya-upaya pemberdayaan melalui pendidikan/pelatihan).

---

Dibiayai oleh : Dana DIPA Universitas Airlangga  
 Nomor SK Rektor : 2664/JO3/PP/2006  
 Tanggal : 12 April 2006

## SUMMARY

### EMPOWERMENT OR IMPEDIMENT? THE IMPACTS OF MICRO-CREDIT TARGETTED WOMEN IN ACCORDANCE WITH THE DECLARATION OF THE YEAR OF MICRO FINANCIAL INDONESIA 2005

#### (PEMBERDAYAAN ATAU PEMBEBANAN? DAMPAK KREDIT MIKRO UNTUK PEREMPUAN DALAM RANGKA PENCANANGAN TAHUN KEUANGAN MIKRO INDONESIA 2005)

(Sulikah Asmorowati dan Bintoro Wardiyanto)  
Jurusan Ilmu administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Tahun 2006, 46 halaman

This research aims to describe the impacts of micro-credit programmes targetted women on their beneficiaries. It focuses on whether the impacts lead to empowerment or contradictly impediment for the women beneficiaries, and thus enforce the *triple burden of women*, in which women have responsibilities for reproduction, production and social functions in the community.

The research is based on the Government's declaration on the action programmes againts poverty through the empowerment of micro, small and medium enterprises (*usaha mikro, kecil dan menengah* (here after *UMKM*), together with the declaration of the year of 2005 as the year of micro financial in Indonesia. These declarations have demonstrated the government's commitment to the development of UMKM which in Indonesia currently reaches a number of 42 million or 99,85% from the total enterprises.

As a programme, micro-credit gives an access for the poor to financial resources, which was nearly impossible before. Indeed, lack of financial resources is the key why the poor stays poor. Thus, micro-credit programmes are regarded as the key for poverty reduction strategies. Interestingly, there has been an increasing tendency for a micro-

credit programme to target women beneficiaries and specifically poor women. More importantly, micro-credit programmes have been regarded as a means to empower their women beneficiaries. In short, there is the fact that women play a significant role to transfer microcredit to their families. Yet, there is the question on whether micro-credit leads to empowerment or in contrast impediment to women.

The research is descriptive in nature as the researcher seeks to describe how the impacts of micro-credit for its women beneficiaries are. The population of this research is women who are the beneficiaries of the micro-credit programme managed by the *Asosiasi Pendukung Perempuan Usaha Kecil* (Here after ASPPUK) *Lembaga Widya Darma*, based at *Jl. Dukuh Kupang Timur Surabaya*. Informants were chosen with 'purposive sampling' with the assumption that informants are those who know exactly about the topic. The informants were 22, consist of 20 women beneficiaries and 2 ASPPUK's staffs. Datas were collected through interview as well as observation and literature review. These then were analysed qualitatively, presented in qualitative explanation to obtain a conclusion.

This research finds, that micro-credit programmes, especially the one that managed by ASPPUK may lead to empowerment but at the same time can create impediments for women. It empowers women because it provides access for women to personal resources i.e. family income and market oriented works. Besides, micro-credit provides access for women to public resources in the way that women can participate in the decision making on wide range family matters as well as manage the loan. Lastly, micro credit can empower women in the way that women can control their own bodies. One

that is found in this research is that micro credit can reduce incidents of violence against women.

However, micro-credit can be impediments for women because this sort of programme tend to legitimate more burden on women. A micro-credit programme tends to focus on lack of financial amongst women only, but this kind of programme forget how women's times and energy have been so limited for domestic works and therefore tend to re-enforce the *triple burden of women*.

As suggestion, this research will not argue that the micro-credit programme is one of the best solutions for poverty reduction strategies in short and medium terms, as it promotes self sustainability amongst the beneficiaries. Yet, this strategy will not be effective unless accompanied by a long term strategy. i.e. gender education for both men and women. Besides, a micro-credit programme will empower women if it is followed by further initiatives such as training and education on such topics as enterprises' management, production technology and skill etc. More importantly, by defining empowerment as 'expansion in the range of potential choices available to women', then the answer of the question whether a micro-credit programme leads to empowerment or impediment for women will certainly depend on the choice of the women beneficiaries. Here, a woman beneficiary who decide to transfer her credit to her husband can be regarded as empowered too as this is her choice.

Lastly, it is important for a micro credit programme to clearly define its goals, that is whether a micro credit programme is designed as a financial institution to fulfil financial needs for the poor only or it has to be responsible for a wider social capacity

building, such as empowerment. If the first is the goal, rather than involving on wider social responsibilities, the micro credit programme should focus solely on financial sustainability. On the contrary, if the later is the goal, then a micro credit programme should focus more on the non economic aspects of poverty through empowering initiatives including such as training and education.

Kata kunci = Empowerment ; Impediment ; micro-credit  
Micro financial.

---

Dibiayai oleh : Dana DIPA Universitas Airlangga  
Nomor SK Rektor : 2664/JO3/PP/2006  
Tanggal : 12 April 2006

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini berjudul "Pemberdayaan atau Pembebanan? Dampak Kredit Mikro Untuk Perempuan Dalam Rangka Pencanangan Tahun Keuangan Mikro Indonesia 2005. Fokus penelitian ini diambil karena pada tahun 2005 lalu presiden telah mencanangkan program aksi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sekaligus mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro Indonesia. Pencanangan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah atas peran UMKM, yang jumlahnya telah mencapai 42 juta (99,85%) dari total usaha yang ada di Indonesia.

Dalam perkembangannya banyak program kredit mikro yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan perempuan. Bahkan saat ini kredit mikro dikalangan perempuan dianggap sebagai sarana efektif untuk memberdayakan mereka. Namun benarkah program kredit mikro memberdayakan ataukah sebaliknya justru membebani para perempuan yang menjadi *target group*nya sehingga semakin memperkuat *triple burden of women* (yaitu dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat).

Ucapan terimakasih tak lupa peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung penelitian ini diantaranya Rektor Universitas Airlangga dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga atas dukungan dananya, serta staf pada Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) Lembaga Widya Darma, serta para perempuan kelompok sasaran yang bersedia menjadi informan. Akhirnya semoga penelitian ini dapat berguna bagi pembacanya dan berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan kredit mikro dan pemberantasan kemiskinan. Selain itu, penelitian serupa dengan dukungan dana dan sumber daya manusia yang lebih besar perlu dilakukan sehingga dihasilkan temuan-temuan baru yang lebih komprehensif.

Surabaya, 13 Oktober 2006

Peneliti

## DAFTAR ISI

Lembar identitas dan Pengesahan.....	ii
Ringkasan dan Summary.....	iii
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xii
<b>Bab I. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	5
<b>Bab II. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>6</b>
II.1. Pengertian Kredit Mikro.....	7
II.2. Mengapa Kredit Mikro.....	8
II.3. Mengapa kredit mikro ditujukan untuk perempuan.....	8
II.4. Kredit Mikro dan Pemberdayaan Perempuan.....	12
II.5. Konsep Pemberdayaan, Dimensi dan Indikator yang Digunakan.....	13
II.6. Pemberdayaan atau Pembebanan.....	17
<b>Bab III. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>20</b>
III.1. Tujuan Penelitian.....	20
III.2. Manfaat Penelitian.....	20
<b>Bab IV. Metode Penelitian .....</b>	<b>21</b>
IV.1. Tipe penelitian.....	21
IV.2. Lokasi penelitian.....	21
IV.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Informan.....	21
IV.4. Metode Pengumpulan Data.....	22
IV.5. Teknik Analisa Data.....	22
<b>Bab V. Hasil dan Pembahasan.....</b>	<b>23</b>
V.1. Perempuan dalam Pencanangan Tahun Keuangan Mikro 2005.....	23
V.2. Dampak Mikrokredit Bagi Perempuan Penerimaannya.....	27
V.2.1. Pemberdayaan dilihat dari akses perempuan terhadap sumber daya personal termasuk pendapatan dan tenaga kerja: Dampak Kredit Mikro Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga, Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga, dan Pembagian kerja dalam rumah tangga.....	27
V.2.2. Pemberdayaan dilihat dari akses perempuan terhadap sumber daya publik: Dampak Kredit Mikro Terhadap Pengambilan Keputusan dan Pengelolaan Pinjaman.....	31
V.2.3. Pemberdayaan dilihat dari kontrol perempuan terhadap tubuh mereka: Dampak dalam kekerasan terhadap perempuan.....	34
V.3. Program Kredit Mikro: Pemberdayaan atau Pembebanan.....	35
V.4. Kredit Mikro: Hambatan dan Peluang.....	38
<b>Bab VI. Kesimpulan Dan Saran.....</b>	<b>40</b>
VI.1. Kesimpulan.....	40
VI.2. Saran.....	42
Daftar Pustaka.....	45

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan penancangan tahun 2005 sebagai *the year of microfinance* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November 2004, Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada hari Sabtu, 26 Februari 2005, telah menancangan program aksi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Presiden juga sekaligus menancangan tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro Indonesia. Untuk mendorong keberhasilan program ini Presiden telah meminta perbankan untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit serta meningkatkan persentase kredit yang disalurkan kepada sektor UMKM. Menurut Aburizal Bakri, Menteri Koordinator Perekonomian, untuk tahun 2005 ini, dalam rencana bisnisnya, perbankan akan menyalurkan kredit ke sektor UKMK sebesar Rp. 60,4 triliun. Menurut Miranda S Goeltom, Gubernur Bank Indonesia (BI), jumlah ini kemungkinan dalam realisasinya nanti akan jauh lebih besar, yaitu paling tidak bisa mencapai Rp. 90 triliun. Selain itu beberapa sumber dana juga akan dialokasikan pemerintah untuk pemberdayaan UMKM tahun 2005 ini, yaitu 1-3% dari keuntungan BUMN, Kelonggaran tarik dana Surat Utang Pemerintah (SUP) Nomor 005 sebesar Rp. 1,474 triliun, serta dana kompensasi BBM bagi UMKM sebesar Rp. 250 miliar (Kompas, 27 Februari 2005).

Pencanangan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah atas peran UMKM, yang jumlahnya telah mencapai 42 juta atau 99,85% dari total usaha yang ada di Indonesia.



Dengan pencanangan ini Presiden berharap angka kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan. Saat ini angka pengangguran mencapai 9-10% dari total penduduk Indonesia. Presiden berharap angka ini turun menjadi 5-6% selama lima tahun kepemimpinannya mendatang. Sebagaimana juga tujuan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan yang sampai tahun 2004 jumlah penduduk miskin mencapai 36,1 juta orang atau 16,6% dari total penduduk Indonesia (Kompas, 14 Maret 2005).

Sementara itu, hingga saat ini kampanye kredit mikro terus menggelinding baik secara nasional maupun internasional. Program kredit mikro, yang memberikan akses kredit yang lebih luas kepada kaum miskin ini dianggap sebagai suatu program kunci bagi upaya pemberantasan kemiskinan, mengingat selama ini masyarakat miskin mendapat banyak halangan untuk mengakses sistem atau lembaga perbankan lainnya. Di tingkat internasional selain pencanangan tahun 2005 sebagai tahun kredit mikro, pada 19-22 April 2005 ini akan diselenggarakan pertemuan puncak kredit mikro di Santiago, Chile dengan agenda bagaimana membuat setidaknya 100 juta penduduk miskin di dunia bisa mempunyai akses terhadap kredit mikro. Bank-Bank besar internasional, seperti Standart Chartered Bank, Citibank, termasuk juga bank-bank terkemuka di Indonesia, mengikuti pendahulunya Bank Rakyat Indonesia, juga telah membentuk unit-unit yang mengkhhususkan diri untuk kredit mikro (Kompas 15 Maret 2005).

Yang menarik, dalam tahun-tahun terakhir ini, di kalangan negara dunia ketiga (seperti India dan Banglades termasuk Indonesia) dipelopori pula oleh Lembaga-Lembaga internasional dunia (seperti PBB dan Bank Dunia), telah menekankan pentingnya kredit mikro untuk mengatasi kemiskinan dikalangan perempuan, yaitu untuk

memenuhi kebutuhan para perempuan miskin yang selama ini cenderung terabaikan (Pearson, 1992; Moser, 1992). Di Indonesia, komitmen ini terlihat dengan diselenggarakannya program kredit mikro yang dikelola oleh Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK dulu YASPPUK), yaitu lembaga jaringan beranggotakan 54 LSM dan 22 partisipan di 22 propinsi di Indonesia. ASPPUK dalam program kredit mikro-nya melakukan kegiatan *revolving fund* yang ditujukan untuk memberdayakan perempuan melalui pemberdayaan usaha produktif mereka (M. Firdaus dan Titik Hartini 2001: 42; Dewayanti dan Chotim 2004)

Dalam kerangka *women in development* (perempuan dalam pembangunan) kemudian berkembang menjadi *gender and development* (gender dan pembangunan) (Pearson, 1992; Young, 1993; Moser, 1992). Lebih banyak program kredit mikro ditujukan bagi para perempuan, khususnya yang berstrata ekonomi rendah. Di Banglades, 4 juta perempuan menjadi penerima kredit mikro (Morduch dalam Hunt et al. 2001), sementara itu sepertiga dari total kredit mikro di dunia diterima oleh kelompok sasaran perempuan di India (Elavia, 1994 dalam Panjaitan et al. 1999).

Dengan argumen untuk keadilan dan efisiensi, kredit mikro untuk perempuan telah mengurangi hambatan bagi para perempuan, khususnya kelompok miskin untuk mengakses keuangan dunia, khususnya para perempuan yang tersingkir dari lembaga keuangan formal yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh para lelaki atau kalangan masyarakat yang lebih mampu (UNDP, 1995 dalam Hunt et al. 2001). Yang terpenting saat ini adalah program-program pemberian kredit mikro telah dianggap sebagai sarana untuk memberdayakan perempuan (Hunt et al. 2001; Rajivan, 2001).

Sementara itu peringatan hari perempuan sedunia tanggal 8 Maret 2005 lalu, telah pula ditandai dengan penekanan pada upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di kalangan perempuan, salah satunya dengan memperluas akses terhadap kredit mikro bagi para perempuan tersebut.

Dari berbagai uraian diatas, jelas bahwa perempuan memegang peranan penting dalam mentransfer kredit mikro ke keluarga mereka. Permasalahannya kemudian adalah apakah para perempuan yang menjadi kelompok sasaran atau penerima kredit mikro itu benar-benar diuntungkan atau dalam hal ini diberdayakan atau sebaliknya dengan menjadi penerima kredit mikro maka para perempuan dengan peran domestiknya justru semakin dibebani sehingga memperkuat *triple burden of women*, yaitu dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat.

Penelitian ini menjadi semakin penting mengingat data dari Badan Pusat Statistik dalam Indikator Sosial Perempuan Indonesia 1997, menunjukkan bahwa terdapat 63,54% penduduk perempuan yang bekerja dalam pekerjaan utama di desa, sementara untuk laki-laki sebesar 61,43%. Selain itu data BPS (2001) juga menunjukkan bahwa perempuan memegang 44,29% kepemilikan usaha mikro di Indonesia (usaha kecil hanya 10,28%). Walaupun jumlah ini lebih kecil dibanding kepemilikan laki-laki atas usaha mikro (yaitu 52,21%), diyakini secara riil, persentase ini jauh lebih besar karena data BPS tersebut didasarkan pada kepemilikan usaha secara formal dan bukan pelaku riil di lapangan (M. Firdaus dalam Kompas, 7 Maret 2005).

Selain itu fokus penelitian pada dampak kredit mikro untuk para perempuan, ini juga signifikan, mengingat studi tentang penyelenggaraan program kredit mikro yang efektif atau studi tentang efektivitas program ini bagi pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan (seperti penelitian oleh Rosintan Panjaitan dkk 1999, serta penelitian oleh Joy Remenyi dan Benjamin Quiñones, 2000). Kerangka analisa akan diarahkan pada keterkaitan kredit mikro untuk perempuan dengan pencanangan tahun 2005 ini sebagai tahun keuangan mikro di Indonesia.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini berfokus pada apakah program kredit mikro untuk perempuan memberikan manfaat bagi para penerimanya dalam arti membantu para perempuan *target group*nya untuk bebas dari kemiskinan yang menderanya, yaitu dengan memberdayakan para perempuan tersebut, atau sebaliknya justru semakin membebani para perempuan penerimanya yang juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau aktivitas domestik keluarga mereka.

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak kredit mikro untuk perempuan penerimanya?
2. Apakah dampak tersebut mengarah pada pemberdayaan atau sebaliknya pembebanan bagi para perempuan yang menjadi *target group*-nya?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan berbasis manusia (*people centered development*) melalui pendekatan pembangunan dari bawah (*bottom-up atau grass roots developments*), telah menjadi strategi pembangunan favorit dewasa ini. Diantara inisiatif pembangunan dari bawah (masyarakat) ini, program-program kredit mikro dipandang sebagai suatu strategi anti kemiskinan yang menjanjikan. Hal ini karena program ini memungkinkan masyarakat miskin yang menjadi *target group*-nya memiliki masa depan yang lebih cerah dengan kemandirian yang menjadi tujuan akhir program tersebut (Woller et al, 2001).

Lembaga-lembaga pembangunan internasional, seperti Bank dunia (The World Bank), Lembaga PBB untuk Program-Program Pembangunan (the United Nations for Development Programme (UNDP)) dan banyak lembaga internasional lain berpandangan bahwa program kredit mikro berperan dalam mengatasi kemiskinan kronis, khususnya dalam memberdayakan penduduk miskin (Woller et al, 2001). Tidak heran jika program kredit mikro telah menjadi prioritas kampanye di dunia sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan di atas. Pada Juni 1998, total terdapat 14.808.871 peminjam kredit mikro di dunia dan seperti telah diuraikan diatas, tahun 2005 ini Bank Dunia dan PBB menargetkan 100 juta penerima kredit mikro di seluruh dunia (Yunus dalam Remenyi et al., 2000, p. vii; Panjaitan et al., 1999, p. 770)

## II.1. Pengertian Kredit Mikro

Menurut Microcredit Summit 1997, kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. (*Programmes extend small loans to very poor people for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families*) (Woller et al. 2001, p. 265; Kompas, 15 Maret 2005)

Beberapa kecenderungan dalam program kredit mikro saat ini adalah: 1) lebih banyak ditujukan untuk perempuan; 2) kredit disalurkan pada seorang individu sebagai anggota suatu kelompok; 3) pembayaran kembali bergantung pada ketepatan dan kedisiplinan kelompok (Kabcer. 2001, p.63).

Perlu diketahui pula bahwa saat ini mikro kredit seringkali dipandang sebagai 'obat' dari masalah kemiskinan. Program ini tidak hanya dijadikan instrumen agar kelompok miskin mempunyai akses pada lembaga keuangan formal, tapi lebih lanjut telah menjadi suatu gerakan untuk memberdayakan masyarakat miskin, khususnya perempuan, yaitu dalam menanggulangi kemiskinan mereka, memperbaiki kualitas hidup dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan kelompok sasaran untuk berpartisipasi aktif baik secara ekonomi maupun sosial (Rajivan, 2001).

## II.2. Mengapa Kredit Mikro

Seperti telah diketahui, investasi dalam bentuk keuangan atau modal adalah sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Faktor inilah yang khususnya menjadi penghalang bagi kaum miskin yang punya sedikit atau bahkan tidak punya akses sama sekali terhadap keuangan dan modal. Sementara itu kredit seringkali adalah mata rantai yang hilang (*the missing link*) bagi keluarga miskin yang mencoba mempertahankan hidupnya dengan menjalankan suatu usaha mikro atau usaha kecil. Karenanya susah untuk keluar dari perangkap kemiskinan (Panjaitan et al, 1999, Remenyi, 2000).

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka program kredit mikro diperlukan, yaitu untuk menyediakan modal baik ditujukan untuk memulai atau melanjutkan suatu usaha mikro atau kecil sebagai usaha peningkatan pendapatan (*income generating*). Namun kenyataan yang ada selama ini adalah bahwa usaha berskala besar mempunyai akses yang lebih (atau sangat) mudah terhadap kredit perbankan, sementara usaha mikro, terutama yang dijalankan oleh rumah tangga miskin sering harus bangkrut atau bahkan tidak dapat dimulai karena kurangnya akses terhadap kredit.

## II.3. Mengapa kredit mikro ditujukan untuk perempuan?

Pendekatan anti kemiskinan dalam kerangka perempuan dalam pembangunan (*women in development*) menempatkan perempuan sebagai kelompok termiskin dari yang miskin. (*the poorest of the poor*) (Moser, 1992; Moser dalam Petterson, 1996; Remenyi, 2000). Beberapa pendapat bahkan mengatakan bahwa rumah tangga yang dikepalai seorang perempuan sering menjadi kelompok *the poorest of the poor*

(Panjaitan et al, 1999, p. 770; the World Bank, 1989 dalam Jackson, 1996). Menurut Rose (1992), akses terhadap sumber daya dapat membebaskan perempuan dari kemiskinan. Asumsi inilah yang membuat lebih banyak perhatian diberikan pada kebutuhan perempuan. Tidak heran, perempuan telah menjadi kelompok sasaran utama dari kredit mikro (Remenyi, 2000).

Namun, sebagaimana pendapat Jackson (1996), pendekatan anti kemiskinan diatas, cenderung telah menekankan pada apa yang disebut sebagai "*feminization of poverty*" (meperempuankan kemiskinan), yaitu pendeskripsian yang tidak proporsional tentang perempuan sebagai kelompok miskin, karena kenyataannya beberapa studi menemukan bahwa rumah tangga yang dikepalai seorang perempuan tidak selalu berasosiasi dengan kemiskinan (Lloyd and Gage-Brandon, 1996 and Agarwal, 1986 in Jackson 1996)

Argumen yang lebih rasional tentang mengapa kredit mikro lebih baik ditujukan pada perempuan, dapat digali dari strategi bertahan hidup perempuan, di sektor informal, yang juga berkaitan dengan karakteristik umum perempuan yang selama ini dikenal. Menurut Rose (1992), karakteristik perempuan dibandingkan dengan pria adalah mereka lebih mampu bertahan terhadap kemiskinan yang mereka derita. Hal ini karena perempuan mempunyai inisiatif/cara yang jauh lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Disamping kemampuan untuk mengolah sedemikian rupa penghasilan keluarga mereka, para perempuan juga terbukti sangat fleksibel dalam mengkombinasikan pekerjaan domestik mereka dengan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan keluarga. Singkatnya, perempuan mempunyai

kontribusi dalam mengembangkan/memodernisasikan ide-ide dan ketrampilan-ketrampilan jika mereka diberi kesempatan.

Lebih penting lagi, terdapat argumen bahwa perempuan jauh lebih rajin dan teliti dalam memperhatikan jadwal pengembalian kredit mereka dibandingkan para pria, akibatnya mereka lebih disiplin dalam mengembalikan pinjaman (Remenyi, 2000, p. 53). Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa dalam suatu program kredit mikro yang sama, perempuan mempunyai tendensi yang lebih baik dibanding pria dalam hal pengembalian pinjaman serta dalam hal dampak jangka panjang program terhadap pembangunan sumber daya manusia. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian untuk program-program mikro kredit bertargetkan perempuan selama ini rata-rata mencapai diatas 90%. Sebagai contoh, menurut statistik PBB tentang perempuan dunia (1995), tingkat pengembalian suatu program kredit mikro untuk perempuan, di Indonesia mencapai sebesar 91%, sementara program lain yang ber-target group pria persentasenya 'hanya' 80% (Panjaitan et al, 1999, p. 771, 774; Robinson, 1997). Tingkat pengembalian sebesar 90% ini juga terjadi di India (Rajivan, 2001). Tingginya tingkat pengembalian ini telah membuat para pembuat keputusan termasuk para agen donor percaya bahwa ber-bank dengan perempuan adalah '*a financially sustainable operation*' atau kegiatan keuangan yang berkesinambungan (Rajivan, 2001).

Selain alasan diatas, ada beberapa argumen penting mengapa meminjamkan kredit mikro pada perempuan lebih *feasible* atau efektif. Argumen pertama adalah perempuan lebih mungkin untuk menggunakan pinjamannya bersama dengan suami atau anggota

keluarga lelaki mereka yang lain, dibanding sebaliknya lelaki peminjam dengan istri atau anggota keluarga perempuan yang lain. Selanjutnya, disamping perempuan diuntungkan secara personal dan sosial, kredit mikro untuk perempuan juga diyakini memberikan manfaat yang lebih bagi keseluruhan keluarga dibanding kredit mikro untuk pria. Selain itu, perempuan mempunyai kecenderungan untuk menggunakan hampir keseluruhan pendapatannya untuk keluarga, seberapa kecil pendapatan tersebut dan lebih memperhatikan masa depan anak-anak mereka dan siap untuk berkorban apa saja untuk mewujudkan masa depan tersebut (Kabeer, 2001; Khandker 1998, Kabeer, 1998, Rose, 1992; United Nations 1995 dalam Hunt et al, 2001).

Alasan terpenting lain adalah pinjaman kepada pria cenderung meneruskan dan atau memperparah ketidakadilan gender dalam rumah tangga (*internal gender inequalities of households*) yang berarti pula "memperkuat posisi para pria dengan memberi mereka sumber daya dengan mana mereka mampu mencegah keikutsertaan para istri mereka untuk terlibat dalam aktivitas perolehan pendapatan mereka (Kabeer, 2001, p. 83)".

Dalam kenyataan, struktur sosial masyarakat di banyak negara berkembang (seperti Bangladesh, dan beberapa daerah di Indonesia) cenderung tidak menguntungkan atau bahkan merendahkan (*deprived*) kaum perempuan, meski bagi para perempuan dikalangan berada. Dibandingkan dengan para pria di kelompok yang sama, para perempuan seringkali kurang dapat menyadari dan menggali potensi-potensi kewirausahaan mereka. Hal ini disebabkan gender mereka telah menjadi penghambat (*barrier*) untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan. (Kabeer, 2001; Mahmud,

2003). Disinilah kredit mikro untuk perempuan berperan untuk mengarahkan sumber daya yang ada (dalam hal ini keuangan) kepada para perempuan tersebut. Dengan pengelolaan kredit mikro yang lebih efisien dan efektif, program kredit mikro ini juga dapat menjadi dasar bagi para perempuan untuk menghadapi 'ketidakadilan' (*injustice*) dalam kehidupan mereka, karenanya secara berkelanjutan mengarah pada pemberdayaan perempuan (*sustainable pathways to women's empowerment*).

#### II.4. Kredit Mikro dan Pemberdayaan Perempuan

Evaluasi terhadap program kredit mikro dan dampaknya bagi para perempuan, khususnya apakah program ini mempunyai kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan menjadi penting demi keberlanjutan program ini secara finansial (*to make programs financially sustainable*) serta demi tercapainya efektivitas program (Mahmud, 2003). Seperti telah diuraikan diatas, terdapat anggapan bahwa program kredit mikro secara otomatis berarti pemberdayaan. Anggapan ini begitu terinternalisasi sehingga para pembuat kebijakan termasuk lembaga-lembaga non pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melihat kredit mikro sebagai obat/penyembuh dari segala penyakit/masalah (*'the panacea of all ills'*) (Rajivan, 2001; Hunt et al., 2001). Sebagai contoh, penelitian tentang 'Grammen bank' (bank pemberi kredit mikro untuk perempuan di Banglades) menemukan bahwa desa-desa di sekitar grammen bank, tingkat kemiskinan absolutnya 75% lebih rendah dibanding desa-desa yang tidak menjadi target grammen bank tersebut (Bhatt et. al, 2001).



Mayoux (1999) juga berpendapat bahwa akses terhadap kredit mikro untuk perempuan mempunyai efek penting terhadap proses pemberdayaan perempuan. Dalam pendapatnya kredit mikro mengimplikasikan tiga hal, yaitu keberlanjutan keuangan yang mandiri (*the financial self-sustainability*), pengentasan kemiskinan (*the poverty alleviation*) and pemberdayaan para feminis (*the feminist empowerment*). Disini Mayoux menekankan pula bahwa program kredit mikro untuk perempuan mengarah pada pemberdayaan ekonomi para perempuan tersebut yang hal ini akan lebih jauh mengarah pada pemberdayaan sosial, politik dan legal dan pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan *'social capital'* atau modal sosial yaitu dengan melalui berkembangnya jaringan antar mereka (dalam Mahmud, 2003).

Namun, dari review literatur tentang pemberdayaan perempuan diketahui bahwa masih sedikit penelitian dasar di masyarakat (*primary research at the grassroots level*) untuk memahami tentang apa sebenarnya arti pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari para perempuan. Selain itu ada banyak definisi, sekaligus berbagai macam dimensi pemberdayaan yang mengarah pada indikator yang berbeda, serta interpretasi dan hasil evaluasi yang berbeda pula (Kabeer, 2001; Mahmud, 2003).

### **11.5. Konsep Pemberdayaan, Dimensi dan Indikator yang Digunakan**

Menurut Kabeer (1999, p. 2), konsep pemberdayaan merujuk pada *"power as determining choice and ability to choose"*, yaitu kekuasaan untuk menentukan pilihan dan kemampuan untuk memilih. Lebih jelasnya, konsep ini berarti proses dengan mana

mereka yang tidak berkemampuan untuk memilih menjadi berkemampuan untuk itu (dalam Mahmud, 2003, p. 585).

Konsep pemberdayaan dalam aktivitas pembangunan telah sejak lama ditekankan pada kesejahteraan perempuan (Sen, 2000 dalam Mahmud, 2003). Menariknya, telah ada pergeseran penekanan terhadap konsep pemberdayaan bagi para perempuan, yaitu dari penerimaan pasif: pemberdayaan para perempuan dalam kaitannya dengan kecenderungan superioritas pria (*the relative well being of women vis-à-vis men: passive acceptance*), ke arah penekanan pentingnya peranan agen-agen pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan semua keluarga, khususnya perempuan (*more active acceptance and participation*). Dalam hal kredit mikro untuk perempuan, konsep pemberdayaan harus mengarah pada konsep pemberdayaan pasif dan aktif mengingat perempuan seringkali harus berhadapan dengan ketidakadilan oleh kaum pria.

Definisi pemberdayaan yang sesuai dengan kerangka kerja kredit mikro dikaitkan dengan upaya pemberdayaan dijelaskan oleh Mayoux' (1998). Menurut Mayoux, dalam konteks ini pemberdayaan adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk mendeskripsikan suatu proses dimana orang yang tidak berdaya menjadi sadar akan situasi mereka sendiri kemudian mengorganisasikan diri mereka secara kolektif, ditujukan untuk memperoleh akses yang lebih terhadap pelayanan publik serta untuk pengembangan tingkat ekonomi mereka (dalam Rajivan, 2001).

Dari berbagai kerangka kerja dan indikator pemberdayaan yang relevan untuk program kredit mikro, untuk menjelaskan dampak kredit mikro bagi pemberdayaan perempuan, penelitian ini, mengelaborasi kerangka pemikiran Rajivan (2001) and Mahmud (2003), dengan pertimbangan terdapat keterkaitan dalam kerangka pemikiran mereka serta lebih praktikal.

Dengan merujuk pada kerangka pemikiran Kabcer (1992), Mahmud (2003) membagi kerangka kerja-nya menjadi tiga tahap pemberdayaan:

1. Kondisi pemberdayaan, yang terdiri dari akses terhadap sumber daya material dan non-material.
2. Rute ke pemberdayaan, diukur dengan akses akses terhadap pendapatan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan di keluarga
3. Terciptanya pemberdayaan berkaitan dengan perbaikan kesejahteraan secara relatif dan absolut.

Sementara itu, dalam penelitiannya tentang dampak kredit mikro dan pemberdayaan perempuan di Banglades, menurut Rajivan (2001), terdapat 8 dimensi pemberdayaan, yaitu:

1. Akses dan kontrol terhadap aset dan sumberdaya perorangan
2. Akses terhadap sumber daya publik
3. Kontrol terhadap tenaga kerja dan pendapatan
4. Kontrol terhadap tubuh mereka sendiri (keamanan dan kenyamanan sex, reproduksi dan fisik)
5. Kontrol terhadap mobilitas fisik

6. Akses dan kontrol terhadap ruang politik
7. Akses dan kontrol terhadap sumber daya yang bersifat *intangible* (informasi, pengaruh-pengaruh politik)
8. Posisi yang sama dan akses dalam struktur hukum.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas. untuk memperoleh hasil analisa yang mendalam maka penelitian ini hanya akan memfokuskan pada dampak kredit mikro terhadap proses pemberdayaan perempuan dalam kaitannya dengan aspek internal keluarga. Karena itu dimensi/variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Akses/kontrol perempuan terhadap aset dan sumber daya perorangan (baik material maupun non- material), termasuk tenaga kerja dan pendapatan (dimensi pertama dan ketiga dari kerangka pemikiran Rajivan). diukur dengan:
  - kepemilikan akan aset individual, yaitu tingkat kesejahteraan/pendapatan keluarga
  - keikutsertaan dalam pengambilan keputusan akan aset individual tersebut. dalam hal ini pendapatan keluarga dan akses istri/perempuan terhadap pendapatan suami/pria)
  - pembagian kerja (*division of labour* antara istri dan suami). yaitu dimana secara tradisional istri bertanggung jawab pada aktivitas domestik, seperti membesarkan anak, membersihkan rumah, memasak dan pekerjaan rumah tangga yang lain; sedangkan suami bertanggung jawab pada aktivitas produktif berkenaan dengan perolehan pendapatan. Penelitian ini juga ingin mengetahui: apakah pembagian kerja ini tetap

berlaku ataukah telah ada kerjasama antara pekerjaan domestik dan produktif keluarga antara suami dan istri.

- keamanan pangan/tingkat konsumsi baik secara kuantitas dan kualitas
  - tingkat pendidikan anak, khususnya anak perempuan.
2. Akses terhadap sumber daya publik, dalam hal ini akses dan kontrol terhadap pendapatan yang berasal dari pinjaman kredit mikro dan pemanfaatannya, yaitu apakah perempuan mengambil kontrol dalam penggunaan kredit yang diperolehnya, mengelola sendiri usaha kecil mereka termasuk pemasaran produk mereka dan mengontrol uang hasil usaha mikro tersebut.
3. Kontrol perempuan terhadap tubuh mereka diukur dengan keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal yang penting dalam perkawinan mereka, seperti dalam:
- Keputusan mengenai anak (termasuk jumlah, jarak, atau bahkan penentuan jenis kelamin, dan cara membesarkannya)
  - penggunaan kontrasepsi dan aborsi
  - berhubungan seksual dengan suami.
  - kecenderungan untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

## II.6. Pemberdayaan atau Pembebanan?

Disamping efek pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga seperti terurai di atas penelusuran awal terhadap literatur juga ditemukan bahwa selain memberdayakan

kelompok sasarannya, dalam beberapa kasus pemberian kredit mikro kepada perempuan juga telah menjadi beban tersendiri bagi para perempuan.

Beberapa contoh kasus misalnya terbukti bahwa mikro kredit menurunkan tingkat tindak kekerasan oleh suami kepada perempuan karena kontribusi perempuan secara ekonomi, namun dalam beberapa kasus tindak kekerasan ini lebih meningkat yaitu ketika terjadi keterlambatan dalam memperoleh kredit mikro atau berhubungan dengan pemanfaatan mikro kredit tersebut. (Goetz dan Sen Gupta, Khan et al. dalam Hunt, et al, 2001)

Sementara itu dampak kredit mikro terhadap tingkat konsumsi keluarga. Menurut Pit dan Khandker (1995), kredit mikro memungkinkan meningkatnya tingkat konsumsi keluarga baik secara kualitas dan kuantitas. Hal ini membuktikan adanya peran perempuan dalam salah satu aspek pengambilan keputusan di keluarga karenanya mengarah ke pemberdayaan (dalam Kabeer, 2001).

Namun disisi lain, posisi perempuan menjadi semakin berat, yaitu dimana disamping melakukan aktivitas domestiknya para perempuan juga dituntut pula untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan konsumsi keluarga mereka yang selama ini menjadi tanggung jawab para lelaki (dalam Kabeer, 2001, p.67).

Selain itu, seperti yang diuraikan Pearson (1992, p. 308), proyek-proyek *income generating* seperti kredit mikro ini menekankan hanya pada satu aspek yaitu kekurangan modal bagi para perempuan, tetapi proyek-proyek tersebut lupa bahwa

waktu para perempuan tersebut sudah sangat sempit, dengan beban yang cukup berat pula. Pearson selanjutnya berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga, beban kerja para perempuan miskin di negara dunia ketiga secara sistematis melebihi beban para pria/suami mereka.

Sementara itu tidak jarang pula, kredit mikro malah membuat para perempuan rentan dalam hal keuangan (*financially vulnerable*) atau terjebak dalam kredit macet, misalnya ketika terjadi kerugian dalam usaha mikro mereka atau jika beternak, ternaknya mati, terutama jika kredit mikro yang semestinya diperuntukkan untuk usaha produktif malah digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

Permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pembebanan terhadap para perempuan inilah yang juga akan dieksplorasi dalam penelitian ini, disamping juga penekanan pada dampak positif kredit mikro yang mengarah pada pemberdayaan.

### BAB III

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### III.1. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak kredit mikro untuk perempuan, khususnya apakah dampak tersebut mengarah pada pemberdayaan atau sebaliknya pembebanan bagi para perempuan penerimanya yang hingga saat ini masih bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas domestik sehingga semakin memperkuat *triple burden of women*, yaitu dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan sekaligus fungsi sosial di masyarakat.

### III.2. MANFAAT PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bermanfaat bagi pemecahan masalah pembangunan, sedangkan secara khusus:

1. Dengan hasil penelitian ini maka dapat diketahui apakah kredit mikro bagi para perempuan lebih banyak berdampak positif, yaitu memberdayakan atau sebaliknya cenderung membebani para perempuan target *group*-nya.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perumusan kebijakan di bidang keuangan mikro untuk mencari upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien khususnya berkenaan dengan feasibilitas kredit mikro untuk perempuan.
3. Hasil penelitian ini mempunyai kontribusi yang positif terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan, khususnya pemberdayaan perempuan.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### IV.1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena peneliti hendak mengetahui bagaimana dampak kredit mikro untuk perempuan, khususnya apakah dampak tersebut lebih ke arah dampak positif (pemberdayaan perempuan) atau sebaliknya semakin membebani para perempuan penerimanya yang identik dengan pekerjaan domestik rumah tangga, sehingga semakin memperkuat *triple burden of women*, yaitu dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat.

#### IV.2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Surabaya, mengingat sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, problem kemiskinan di kota Surabaya, khususnya di kalangan perempuan masih sangat signifikan sehingga upaya-upaya untuk memberdayakan sumber daya manusianya, khususnya para perempuan sangat perlu untuk dilakukan.

#### IV.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Informan

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah para perempuan penerima kredit mikro. Semula data para perempuan yang sedang menerima kredit mikro direncanakan diperoleh pula dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang merupakan pelopor dan hingga saat ini merupakan institusi perbankan terbaik penyalur kredit mikro di Indonesia

(Robinson, 1997), dan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun ketika penelitian dilakukan ternyata kedua lembaga perbankan ini tidak mempunyai data khusus tentang penerima kredit perempuan karena keduanya memang tidak mempunyai *scheme* kredit yang khusus menargetkan perempuan. Karena itu penelitian ini hanya mengambil informan dari kelompok sasaran program kredit mikro yang dikelola Asosiasi Pendukung Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) Lembaga Widya Darma yang berkantor di Jl. Dukuh Kupang Timur Surabaya serta beberapa staf ASPPUK Lembaga Widya Darma. Informan diambil secara purposive. Teknik ini digunakan dengan nalar bahwa kita sudah mengetahui secara jelas kriteria sampel yakni para perempuan penerima kredit mikro. Sampai akhir penelitian, informan berjumlah 22 orang yang terdiri dari 20 perempuan penerima kredit mikro dan 2 orang staf ASPPUK.

#### **IV.4. Metode Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup. Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang relevan, seperti pengguliran dana. selain itu studi pustaka dengan memanfaatkan buku, artikel koran, jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan juga menjadi titik tolak terpenting dalam penelitian ini.

#### **IV.5. Teknik Analisa Data**

Data dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk naratif, berupa uraian-uraian kualitatif, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

**BAB V****HASIL DAN PEMBAHASAN****V.1. Perempuan dalam Pencanangan Tahun Keuangan Mikro 2005**

Sebelum pembahasan tentang dampak kredit mikro bagi perempuan, sebagai informasi awal, penelitian ini juga akan membahas tentang bagaimana posisi perempuan dalam pelaksanaan tahun keuangan mikro pada tahun 2005. Yaitu apakah pencanangan tahun keuangan mikro tersebut telah memperhatikan aspek keadilan gender atau dengan kata lain apakah kebijakan tersebut telah menginkorporasikan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).

Pencanangan tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro telah menekankan pentingnya kredit mikro atau penyediaan keuangan untuk pengembangan UMKM. UMKM sendiri merupakan sumber pendapatan dan pekerjaan yang vital di banyak negara berkembang, khususnya di daerah urban (perkotaan), termasuk di Indonesia. Kenyataannya, aktivitas usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM (jumlah UMKM mencapai 42 juta, atau 99.85 persen dari total usaha yang ada di Indonesia, selanjutnya dari jumlah tersebut 98%-nya adalah usaha mikro (Tambunan, 2002 dalam Ismawan, 2002).

Seiring dengan pencanangan tahun keuangan mikro dimana pemerintah meminta perbankan untuk meningkatkan persentase kredit yang disalurkan kepada sektor UMKM, persaingan di sektor perbankan telah memaksa bank-bank untuk mendiversifikasi produk perbankan mereka dalam pasar yang baru. Pasar baru ini

adalah pasar keuangan mikro. Beberapa bank juga telah mendengar bahwa pasar baru ini menguntungkan (ditandai dengan suksesnya beberapa perbankan yang menggarap pasar ini). Tidak mengherankan bila akhir-akhir ini banyak produk perbankan ditawarkan untuk melayani pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan usaha kecil.

Sayangnya, penancangan tahun keuangan mikro 2005 disertai dengan munculnya berbagai produk perbankan untuk melayani pelaku UMKM akhir-akhir ini terkesan "netral gender". Kenyataan ini lebih lanjut berimplikasi pada strategi penyusunan program dan institusi keuangan mikro sebagai mediumnya. Hal ini terlihat misalnya dari program Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam aspek nonfinansial maupun finansial yang tak menyinggung persoalan gender (Soetrisno, 2002).

Cara pandang yang netral atau buta jender ini merujuk pada kenyataan dimana situasi perempuan pengusaha mikro dan laki-laki dilihat tanpa melihat adanya persoalan krusial yang khas pada masing-masingnya. Padahal, perempuan pengusaha mikro juga mempunyai persoalan berbeda dari yang dialami laki-laki pengusaha mikro. Bahkan perempuan yang bekerja di sektor usaha mikro menghadapi problematika lebih berat dibanding kaum laki-laki. Dimana mereka menghadapi dua hal sekaligus, yaitu problem teknis usaha dan problem struktural.

Dalam problem teknis usaha perempuan pengusaha mikro mengalami hambatan yang sama sebagaimana pelaku usaha mikro umumnya, seperti kekurangan modal, keterbatasan penguasaan teknologi tepat guna, terbatasnya jaringan pasar, terbatasnya

keterampilan manajemen dan penguasaan ketrampilan teknis produksi, serta terbatasnya kemampuan pengembangan desain. Sedangkan, dalam problem struktural, perempuan tertimpa dua hal sekaligus. Pertama, beragam kebijakan pemerintah berupa peraturan yang tidak adil dan sertifikasi kelayakan produk baik di pusat maupun daerah, dan peraturan kelembagaan seperti perbankan yang memberi layanan kredit, serta ketidaksetaraan relasi dalam rantai produksi dan perdagangan. Kedua, hambatan struktural yang berkaitan dengan "tubuh perempuan", yaitu perempuan merasa kesulitan dalam pengembangan usaha akibat ketimpangan relasi antara perempuan dengan keluarga dan suami di ranah domestik dan di masyarakat (M Firdaus. Kompas 7 Maret 2005).

Dengan perbedaan di atas, membantu perempuan pengusaha mikro memerlukan pendekatan berbeda dengan pengusaha laki-laki. Intervensi pemerintah berupa program ataupun pendanaan lewat lembaga keuangan mikro yang sensitif terhadap persoalan dan kebutuhan perempuan mutlak menjadi arus utama. Karena dalam kredit mikro sendiri sebenarnya tersimpan fungsi pemberdayaan bagi golongan tertinggal, maka perempuan pengusaha mikro yang selama ini terpinggirkan dalam banyak sisi patut mendapat porsi utama dengan program yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan.

Sayangnya, penelitian ini menemukan bahwa kenetralan gender dalam pencairan tahun keuangan mikro ini diikuti oleh lembaga keuangan penyedia kredit mikro (khususnya perbankan) untuk tidak memperhatikan aspek gender dalam produk kredit mikro mereka. Dari hasil wawancara dengan staf pada Badan Perkreditan Rakyat dan Bank Rakyat Indonesia, misalnya, diketahui bahwa mereka tidak mempunyai produk

atau *scheme* kredit mikro yang khusus dialokasikan untuk laki-laki atau untuk perempuan. Jadi mereka hanya mengalokasikan kredit sesuai dengan surat pengajuan kredit dengan tidak memperhatikan apakah yang mengajukan laki-laki atau perempuan.

Yang menggembirakan adalah telah ada upaya pemerintah untuk memformulasi dan mengimplementasikan beberapa mekanisme atau program kredit mikro yang khusus untuk ditargetkan untuk para perempuan diantaranya adalah: Program Kredit Keluarga Sejahtera (KUKESRA), Program Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL), Program Kredit Mikro untuk Penguatan Perempuan Pengusaha Kecil dan Mikro yang dikoordinasikan oleh Asosiasi Pendamping Perempuan Pengusaha Kecil (ASSPUK), Kredit Mikro Pusat Pengembangan Sumber Daya Perempuan, Program Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Perempuan Usaha Kecil (PPEUK) dan banyak lagi.

Dengan diformulasikan dan diimplementasikannya program kredit mikro bertargetkan perempuan beberapa permasalahan yang dihadapi perempuan, khususnya para pelaku kredit mikro dapat terselesaikan, namun begitu, program seperti ini tidak jarang menimbulkan permasalahan baru yaitu semakin membebani para perempuan yang selama ini telah mengalami *triple burden of women*, yaitu dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat, seperti yang akan diulas berikut ini.

## V.2. Dampak Mikrokredit Bagi Perempuan Penerimaanya

Banyak yang mengasumsikan bahwa akses terhadap kredit bagi para perempuan, dengan sendirinya akan meningkatkan status mereka dalam rumah tangga maupun masyarakat, dan karenanya mengarah kepada pemberdayaan perempuan (Hunt et al., 2001). Namun, banyak penelitian, termasuk penelitian ini yang menemukan kenyataan bahwa selain memberdayakan perempuan yang menjadi *target group*-nya, program kredit mikro dapat pula membebani perempuan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan di bawah ini. Penjelasan disesuaikan dengan uraian tentang dimensi pemberdayaan pada bab tinjauan pustaka.

### V.2.1. Pemberdayaan dilihat dari akses perempuan terhadap sumber daya personal termasuk pendapatan dan tenaga kerja: Dampak Kredit Mikro Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga, Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga, dan Pembagian kerja dalam rumah tangga

Apakah kredit mikro berdampak kepada penghasilan dan kesejahteraan keluarga? Penelitian ini menemukan bahwa rumah tangga yang memperoleh pinjaman dari kredit mikro, relatif lebih baik dalam hal kesejahteraan dibanding rumah tangga yang tidak mendapat pinjaman kredit mikro. Hasil wawancara menunjukkan bahwa selain meningkatkan pendapatan keluarga, kredit mikro juga memberi inspirasi/membantu penerimaanya untuk menciptakan suatu usaha produktif baik untuk diri mereka sendiri maupun anggota keluarga mereka. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa kredit memungkinkan penerimaanya untuk mempunyai standar konsumsi yang lebih tinggi, seperti yang terurai dalam wawancara dengan seorang informan berikut ini:

Ya....setelah dapat kredit yang saya gunakan untuk tambahan modal usaha, poia makan kami lumayan membaik mbak, kami makannya jadi lebih sering

tiga kali sehari, kalau sebelumnya seringnya dua kali sehari...belanja saya juga bisa lebih bervariasi, karena ada tambahan penghasilan untuk membeli ikan, atau sekali-kali ayam atau daging (wawancara 6 Juli 2006)

Wawancara lebih jauh dengan informan ini dan lima belas informan lain diketahui bahwa kenaikan penghasilan keluarga setelah mendapat kredit mikro jumlahnya bervariasi diantara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, yaitu berkisar antara Rp. 30.000,00 hingga Rp. 500.000,00 per bulan. Namun begitu ada pula beberapa informan yang menyatakan bahwa pendapatannya tetap atau bahkan menurun.

Hal ini menunjukkan bahwa dampak kredit mikro terhadap kenaikan pendapatan dan kesejahteraan kelompok sasaran masih perlu diteliti lebih lanjut, karena selain kredit mikro, masih banyak faktor yang menyebabkan kenaikan pendapatan dan terlebih kesejahteraan tersebut. Yang menarik, seorang informan bahkan menyatakan bahwa kredit mikro tidak berdampak terhadap pendapatan keluarga mereka karena suami mereka menggunakan pinjaman dari kredit mikro untuk keperluan lain.

Sementara itu, banyak argumen yang menyatakan bahwa meningkatnya akses perempuan dalam memperoleh pendapatan juga akan meningkatkan kemampuan mereka untuk turut serta dalam pengambilan keputusan di keluarga. Dengan pinjaman yang mereka dapatkan dari kredit mikro, para perempuan mempunyai kesempatan untuk bersama-sama dengan suami mereka mengambil keputusan untuk hal-hal yang penting dalam keluarga seperti pengalokasian keuangan rumah tangga, pendidikan anak-anak mereka, keluarga berencana (KB), dan lebih lanjut partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun

ada, dampak kredit mikro terhadap peningkatan akses perempuan dalam pengambilan keputusan di keluarga relatif kecil, seperti terurai dalam hasil wawancara berikut:

Untuk keputusan-keputusan seperti yang mbak bilang itu (pengalokasian keuangan rumah tangga, pendidikan anak, keluarga berencana (KB), dan partisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat) sebelum saya dapat pinjaman alhamdulillah semuanya juga sudah kami putuskan bersama mbak... (wawancara 6 Juli 2006)

Selain itu ...

Oh iya mbak, memang suami sekarang sepertinya lebih mau mendengar apa yang saya katakan, tapi lah wong pinjamannya kecil yah pengaruhnya juga kecil...mungkin kalau jumlah uangnya besar, pengaruhnya lebih besar ya..tapi nanti mengembalikannya besar juga...(wawancara 7 Juli)

Dalam hal pendidikan, diketahui bahwa anak-anak perempuan dari keluarga yang memperoleh pinjaman dari kredit mikro, mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk bersekolah dibanding anak-anak perempuan dari keluarga yang tidak mendapat kredit mikro. Hal ini dikarenakan adanya tambahan penghasilan yang dapat mereka gunakan untuk menyekolahkan anak-perempuan mereka. Sementara itu, meski dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya informan yang anak gadisnya harus berhenti bersekolah untuk membantu pekerjaan ibunya yang semakin bertambah setelah menerima kredit mikro, perlu diketahui bahwa kemungkinan tersebut bisa saja terjadi mengingat beban ganda yang harus disandang perempuan untuk ranah domestik dan produktif.

### **Dampak Kredit Mikro terhadap pembagian kerja**

Di dalam masyarakat, terdapat kecenderungan pembagian kerja dalam rumah tangga yang terus melanggengkan domestifikasi pekerjaan bagi para perempuan. Dengan kata

lain penelitian ini menemukan kenyataan adanya pembagian kerja berbasis gender dalam keluarga, yaitu pria mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan produktif (pekerjaan berkaitan dengan perolehan pendapatan keluarga), sedangkan perempuan mengerjakan pekerjaan domestik (seperti merawat anak, membersihkan rumah, memasak, dan pekerjaan rumah yang lain), seperti hasil wawancara dengan seorang informan ketika peneliti berkesempatan untuk menjadi fasilitator pada pencairan dana untuk program P3EL di Surabaya:

“Ini kan usaha kami berdua, jadi tidak ada salahnya kalau saya yang datang mengambil uang, lagi pula istri saya repot di rumah, dia harus menjaga anak kami...”

Terlepas dari keberlanjutan pembagian pekerjaan tersebut di atas, beberapa informan juga menyatakan bahwa sejak mereka aktif mengembangkan usaha produktif yang menghasilkan pendapatan bagi keluarga, suami-suami mereka menjadi lebih mau bekerjasama dalam tugas-tugas rumah tangga. Karena itu mereka mempunyai lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan pendapatan.

Sebagaimana hasil wawancara:

Dari dulu saya dan suami memang selalu bekerja sama dalam rumah tangga, kami membagi dia yang bertanggung jawab terhadap urusan cari uang, kalau saya mengurus kegiatan rumah tangga...sejak saya mempunyai usaha dan alhamdulillah mulai berkembang, saya bicara ke suami agar mau membantu pekerjaan rumah tangga dan dia sepakat.

Dalam debat tentang kredit mikro, beberapa penelitian yang dilakukan di Bangladesh ataupun di India, diketahui bahwa dalam rumah tangga yang istrinya menjadi penerima kredit mikro, para suami lebih mau untuk membantu istri-istri mereka dalam pekerjaan rumah tangga, khususnya dalam hal merawat anak dan membersihkan rumah. Penelitian ini menemukan bahwa untuk beberapa informan memang suami mereka

bersedia membantu pekerjaan domestik setelah istri mereka menerima kredit mikro, namun ada pula beberapa informan yang tetap melanggengkan pembagian kerja dimana istrilah yang harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, seperti hasil wawancara tentang pembagian kerja dalam rumah tangga yang telah diuraikan di atas.

Hasil wawancara ini juga menunjukkan bahwa meskipun kredit mikro berpengaruh terhadap pembagian kerja, namun pengaruh ini kurang signifikan tanpa adanya pemahaman akan gender dan kesetaraan gender dalam rumah tangga.

Perlu ditegaskan pula bahwa mikro kredit akan berdampak positif jika dimanfaatkan sesuai dengan tujuan idealnya yaitu untuk kegiatan-kegiatan produktif, seperti untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro. Dan hal sebaliknya dapat terjadi jika kredit dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Hal ini akan banyak dijelaskan dalam akses terhadap sumber daya publik berikut.

#### **V.2.2. Pemberdayaan dilihat dari akses perempuan terhadap sumber daya publik: Dampak Kredit Mikro Terhadap Pengambilan Keputusan dan Pengelolaan Pinjaman**

Kontribusi kredit mikro terhadap pemberdayaan perempuan dapat diidentifikasi dari pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penggunaan kredit, seperti siapa yang mengontrol penggunaan kredit, siapa yang mengelola usaha yang didukung oleh kredit, siapa yang mengontrol pemasaran produk, dan siapa yang mengontrol penghasilan yang didapat dari usaha yang didukung kredit mikro. Sesuai pendapat Ackerly (1995), jika para perempuan yang menjadi informan menjawab merekalah

yang mengontrol untuk semua pertanyaan tersebut maka mereka dikatakan telah berdaya.

Penelitian ini menemukan bahwa program mikro kredit meningkatkan kemampuan perempuan untuk membuat keputusan sendiri khususnya berkenaan dengan usaha dan tabungan mereka. Penelitian ini bahkan menemukan bahwa 80% dari informan mempunyai peran utama dalam pengambilan keputusan atau melakukannya secara bersama-sama dengan suami-suami mereka. Namun, penelitian ini menemukan bahwa hanya 20% dari informan yang mengontrol secara penuh atau secara signifikan kredit mikro yang mereka peroleh. Kontrol signifikan ini termasuk pula kontrol dalam memasarkan produk yang mereka hasilkan, sementara 80% informan di atas hanya mempunyai kontrol terhadap pengelolaan pinjaman dan pendapatan yang dihasilkan dari usaha mereka namun tidak dalam hal pemasaran. Hal ini disebabkan akses perempuan yang terbatas terhadap pasar. Dalam kasus demikian pemasaran produksi dilakukan oleh suami-suami mereka.

Selain itu, dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap informan diketahui pula bahwa banyak diantara informan yang mengelola usaha mikro bersama suami mereka atau dengan kata lain usaha mikro yang mereka jalankan merupakan usaha keluarga sehingga menjadi tanggung jawab suami dan istri secara bersama-sama seperti dijelaskan berikut ini:

Untuk pengelolaan pinjaman bagi kami sama saja, saya atau suami yang mengelola pinjaman itu tidak ada bedanya, karena usaha ini adalah usaha kami berdua...hasilnya juga untuk keluarga.

Kontrol perempuan terhadap kredit dan usaha mikro yang mereka punya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pendidikan para perempuan dan suaminya, termasuk juga struktur sosial ekonomi dan budaya yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam banyak struktur sosial masyarakat berlaku sistem patriarki dimana otoritas melekat dalam diri ayah atau anggota keluarga laki-laki lain yang ada dalam keluarga. (Pearson, 1992). Norma ini mewajibkan perempuan untuk meminta ijin kepada suami atau anggota keluarga laki-laki yang lebih tua untuk melakukan banyak hal, termasuk partisipasi aktif dalam kredit mikro termasuk untuk menerima pinjaman. Hal ini kemudian mempengaruhi kontrol terhadap kredit yang diterima. Tidak jarang suami hanya akan mengizinkan istrinya untuk aktif dalam program kredit mikro jika istri-istri mereka menjanjikan akan memberi sebagian dari kredit yang mereka terima kepada suami mereka.

Karena itu tidak mengherankan jika terkadang kredit mikro yang seharusnya bertargetkan atau diterimakan kepada perempuan, kenyataannya ketika pencairan yang menerima adalah suami mereka. Ketika ditanyakan kenapa bukan istrinya yang mencairkan dana sang suami dengan enteng menjawab bahwa istrinya ada di rumah untuk menjaga anak dan melakukan tugas rumah tangga yang lain. Seperti hasil wawancara yang telah dijelaskan pada dampak kredit mikro terhadap pembagian pekerjaan di atas.

Terlepas dari pentingnya kerjasama antara suami dan istri, perlu ditekankan bahwa kredit mikro untuk para perempuan ditujukan agar perempuan yang selama ini cenderung pasif dan termarginalisasikan menjadi lebih berdaya. Karena itu prioritas

dan upaya tetap harus ditujukan kepada hasil akhir agar perempuan lebih berdaya dan tidak hanya tergantung kepada para suami atau saudara laki-laki mereka melainkan mampu menentukan apa yang terbaik untuk dirinya.

### **V.2.3. Pemberdayaan dilihat dari kontrol perempuan terhadap tubuh mereka: Dampak dalam kekerasan terhadap perempuan**

Penelitian ini menemukan beberapa hal yang menarik tentang dampak kredit mikro dan kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan. Dari kajian pustaka diketahui bahwa ada korelasi antara program kredit mikro dengan berkurangnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Wawancara dengan salah seorang pengurus ASPPUK, diperoleh informasi bahwa melalui proses pendampingan, mereka mengetahui bahwa kekerasan terhadap perempuan menurun karena kontribusi istri secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dari kredit yang mereka terima.

Ya... mereka (perempuan penerima kredit mikro) merasa lebih dihargai oleh suami mereka dan karenanya mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan...Tindak kekerasan ini macam-macam termasuk omongan kasar suami terhadap istri (Wawancara 15 Juli 2006).

Namun.

...kami menemui pula kenyataan dimana keterlambatan atau kegagalan seorang istri untuk memperoleh kredit berakibat pada frustrasi suami dan kemudian mengarah ke meningkatnya tindak kekerasan kepada istri. Untungnya, terdapat jaringan dan kerjasama sosial baik formal maupun informal yang tercipta diantara ibu-ibu... jaringan ini terbukti berpengaruh positif terhadap kekuatan istri dalam melakukan perlawanan terhadap tindak kekerasan suami ((Wawancara 15 Juli 2006).

Dalam kasus seperti ini, program kredit mikro yang mendistribusikan uang dengan basis kelompok, telah berkontribusi terhadap menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan.

### V.3. Program Kredit Mikro: Pemberdayaan atau Pembebanan

Apakah kredit mikro mengarah pada pemberdayaan perempuan dan karenanya membantu mereka melepaskan diri dari kemiskinan atau sebaliknya kredit mikro justru membuat segala ketidakadilan gender semakin menjadi dan karenanya membebani para perempuan.

Penelitian ini menemukan bahwa pinjaman untuk perempuan melalui program kredit mikro dapat memberdayakan para perempuan penerimanya, khususnya dalam hal meningkatnya akses mereka terhadap kerja yang berorientasi pasar. Dan memang program kredit mikro yang salah satu tujuannya adalah untuk mempromosikan partisipasi tenaga kerja perempuan, tanpa diiringi dengan akses terhadap pasar di kalangan perempuan akan berakibat pada kelelahan dan beban yang berlebihan bagi para perempuan. Intinya perempuan yang mempunyai waktu lebih banyak untuk aktif dalam kegiatan produktif (aktivitas berkaitan dengan pendapatan keluarga) dapat diinterpretasikan bahwa perempuan tersebut mempunyai akses terhadap pasar.

Dampak pinjaman melalui kredit mikro terhadap pemberdayaan perempuan dapat dilihat pula pada tingkat konsumsi rumah tangga yang lebih baik. Tingkat konsumsi yang lebih tinggi ini menunjukkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada pemberdayaan

Akan tetapi, tingkat konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan tingkat konsumsi keluarga dapat diinterpretasikan secara berlawanan sehingga mengarah pada anggapan bahwa

program kredit mikro semakin membebani para perempuan. Yaitu kenyataan ini menunjukkan bahwa kredit mikro untuk perempuan semakin melegitimasi beban ganda perempuan dimana selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, perempuan mempunyai beban untuk bisa mencukupi kebutuhan konsumsi keluarga yang seharusnya adalah tanggung jawab kepala keluarga (yaitu suami mereka). Bahkan beban ini akan semakin memperkuat *triple burden of women*, yaitu dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat.

Sementara itu proyek yang bertujuan untuk menggulirkan pinjaman dan nantinya pendapatan seperti kredit mikro ini memfokuskan diri hanya pada satu aspek yaitu problem perempuan untuk mengakses keuangan dan pendapatan keluarga, namun program-program seperti ini lupa untuk mempertimbangkan bagaimana waktu para perempuan telah sedemikian terbatas untuk aktivitas domestik. Sebagaimana pendapat Pearson (1992), bahwa dalam suatu rumah tangga yang sama, beban kerja perempuan miskin di negara dunia ketiga melebihi beban kerja para pria.

Karena itu untuk mengatasi hal ini sosialisasi tentang kesetaraan gender menjadi kunci penting bagi keberhasilan upaya pemberdayaan perempuan melalui program mikro kredit. Dengan sosialisasi gender seperti ini maka segala pekerjaan/aktivitas rumah tangga baik yang berhubungan dengan aktivitas domestik maupun aktivitas produktif tidak terdiktomi secara ekstrim (perempuan berhubungan dengan aktivitas domestik, sedangkan pria berhubungan dengan aktivitas produktif) namun dilakukan secara bersama oleh suami dan istri, walaupun harus ada pembagian, maka pembagian

tersebut disepakati secara bersama oleh suami dan istri dan tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama.

Sementara itu, dominasi atau kontrol suami terhadap pinjaman yang berasal dari kredit mikro menunjukkan bahwa kecil sekali manfaat kredit mikro bagi para perempuan disebabkan adanya relasi gender dalam keluarga di mana perempuan kehilangan kontrol atas pinjaman yang didapatnya dari kredit mikro. Hal ini lebih jauh telah membuat perempuan tidak jarang terjebak dengan kredit macet sebagai konsekuensi atas relasi gender.

Dengan kata lain, kredit mikro bisa membuat para perempuan rawan dalam hal keuangan (sebagai contoh jika usahanya bangkrut), yaitu dapat membuat mereka terjebak dalam kredit macet sehingga sulit bagi mereka untuk lepas dari kemiskinan. Kerawanan ini akan semakin menjadi kenyataan terutama jika mereka memanfaatkan kredit yang seharusnya untuk kegiatan produktif menjadi hal-hal yang bersifat konsumtif. Tidak heran, terdapat argumen bahwa mikro kredit tidak jarang menjadi tangga pertama yang licin kepada hutang dan kebangkrutan usahanya.

Untuk hal ini yang perlu dilakukan tentunya adalah kegiatan *follow up* atau lanjutan dari sekedar mendistribusikan pinjaman melalui kredit mikro. Kegiatan lanjutan ini bisa berupa pendidikan dan ketrampilan seperti pelatihan manajemen dan penguasaan keterampilan teknis produksi dan teknis usaha, upaya-upaya untuk meningkatkan penguasaan teknologi tepat guna dan memperluas jaringan pasar dan lain sejenisnya. Semua ini akan memberi bekal pengetahuan (disamping dukungan finansial yang telah

diterima melalui kredit mikro) bagi para perempuan pelaku usaha mikro untuk lebih mengembangkan usahanya.

Dari semua penjelasan di atas, yang terpenting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan mengadopsi pengertian pemberdayaan (*empowerment*) sebagai "ekspansi dari serangkaian pilihan yang ada untuk perempuan (*expansion in the range of potential choices available to women*) (Kaber, 2001, p. 81)." Dengan mengadopsi definisi ini, jawaban untuk pertanyaan tentang apakah kredit mikro memberdayakan atau sebaliknya justru membebani perempuan akan tergantung sepenuhnya pada pilihan perempuan sebagai individu. Sebagai contoh, perempuan yang secara sadar dan sengaja memilih untuk mentransfer kredit mikro yang ia terima kepada suami mereka untuk mengelola dan mengontrol pinjaman tersebut dapat dilihat sebagai 'berdaya' karena inilah yang menjadi pilihannya

#### **V.4. Kredit Mikro: Hambatan dan Peluang**

Untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang ideal dari program kredit mikro, maka pembahasan tentang hambatan dan peluang yang ada dalam suatu program kredit mikro menjadi penting untuk diketahui.

Ada anggapan bahwa memberi pinjaman kepada masyarakat miskin pada dasarnya adalah beresiko. Kepercayaan ini diperparah dengan fakta bahwa program kredit mikro sering berhadapan dengan besarnya biaya operasional dan rendahnya tingkat pengembalian. Meski begitu, tingkat pengembalian yang tercatat cukup tinggi, khususnya untuk program kredit mikro yang bertargetkan perempuan sepertinya telah

menguatkan fakta bahwa memberi pinjaman kepada perempuan yang miskin adalah memungkinkan.

Namun, perlu diingat bahwa program kredit mikro yang kebanyakan diadopsi secara internasional sebagai obat yang mujarab (*panacea*) bagi kemiskinan tidak dan tidak dapat sampai pada yang termiskin dari yang miskin (*the poorest of the poor*). Realitanya, perempuan termiskin seringkali mengeluarkan diri mereka sendiri dengan menghindar sebagai kelompok sasaran dengan alasan ketakutan untuk tidak bisa membayar atau ketakutan akan kebangkrutan jika berusaha. Mereka yang termiskin juga tidak jarang sengaja tidak dilibatkan oleh anggota kelompok mereka yang lain atau oleh aparat pelaksana program dengan alasan ketidakmampuan mereka untuk membayar. disamping juga adanya target-target yang harus dipenuhi oleh aparat pelaksana, seperti dalam hal jumlah kelompok yang terbentuk, uang yang harus didistribusikan, termasuk tingkat pengembalian dan lain sejenisnya.

Sementara itu, kredit mikro telah menjadi suatu industri penawaran (*supply driven industry*) yang dimotori oleh agen-agen pendonor. Akibatnya, program ini cenderung untuk memfokuskan diri pada target-target yang telah ditetapkan, yang sayangnya terkadang mengacuhkan tujuan-tujuan sosial seperti pemberdayaan perempuan. Hal ini terlebih untuk lembaga keuangan mikro, dimana keberlanjutan lembaga sangat tergantung pada bergulirnya kredit (*financial self-sustainability*), sehingga lembaga keuangan seperti ini lebih banyak menargetkan klien atau klien perempuan yang telah mempunyai usaha. Semua ini mengarah pada perlunya peninjauan kembali intervensi kebijakan yang berkenaan dengan program kredit mikro yang akan diuraikan dalam bab kesimpulan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### VI.1. Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kredit mikro mungkin bukan satu-satunya obat mujarab (*panacea*) untuk mengentaskan kelompok sasarannya dari kemiskinan, namun sebagai salah satu upaya untuk memerangi kemiskinan, program kredit mikro meskipun relatif kecil, telah berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga miskin yang jadi kelompok sasarannya termasuk yang terpenting adalah kontribusinya pada penumbuhan kemandirian (*self-reliance*) kelompok sasaran. Penjelasan untuk argumen ini adalah bahwa kredit mikro memberikan akses keuangan kepada kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasarannya, dan kenyataannya keterbatasan keuangan/modal inilah yang menjadi penyebab utama kenapa seseorang tetap miskin.
2. Program kredit mikro yang kebanyakan diadopsi secara internasional sebagai obat yang mujarab (*panacea*) bagi kemiskinan tidak dan tidak dapat sampai pada kelompok masyarakat termiskin dari yang miskin (*the poorest of the poor*). Realitanya, kelompok termiskin (termasuk percampuran termiskin) seringkali mengeluarkan diri mereka sendiri dengan menghindar sebagai kelompok sasaran dengan alasan ketakutan untuk tidak bisa membayar atau ketakutan akan kebangkrutan jika berusaha.
3. Kredit mikro telah menjadi suatu industri penawaran (*supply driven industry*) yang dimotori oleh agen-agen pendonor. Akibatnya, program ini cenderung

untuk memfokuskan diri pada target-target yang telah ditetapkan, yang sayangnya terkadang mengacuhkan tujuan-tujuan sosial seperti pemberdayaan perempuan.

4. Program kredit mikro sangat beragam baik, mekanisme, prosedur, besarnya dana dan lain sejenisnya. Selain itu program ini didesain, diimplementasikan dan dievaluasi secara berbeda. Dalam suatu proses evaluasi atau penelitian, misalnya banyak macam metodologi, kerangka berfikir/kerangka konseptual, dimensi dan indikator pemberdayaan, termasuk penginterpretasian data yang diperoleh. Semua ini mengarah pada kesimpulan yang berbeda untuk suatu permasalahan penelitian seperti apakah kredit mikro untuk perempuan memberdayakan perempuan atau sebaliknya semakin membebani mereka.
5. Untuk menjawab permasalahan tentang apakah kredit mikro memberdayakan atau semakin membebani perempuan penerimanya, penelitian ini menyimpulkan bahwa program kredit mikro, khususnya yang dikelola oleh Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) berkontribusi baik kepada pemberdayaan maupun pembebanan perempuan.
6. Dampak kredit mikro terhadap pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari akses perempuan terhadap sumber daya personal termasuk akses terhadap pendapatan dan tenaga kerja, dimana selain dapat meningkatkan pendapatan perempuan, kredit mikro juga memberi inspirasi/membantu penerimanya untuk menciptakan suatu usaha produktif baik untuk diri mereka sendiri maupun anggota keluarga mereka, disamping juga memberdayakan para perempuan dalam hal meningkatnya akses mereka terhadap kerja yang berorientasi pasar.

7. Peran kredit mikro dalam pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari akses perempuan terhadap sumber daya publik, yaitu akses perempuan terhadap pengambilan keputusan dan pengelolaan pinjaman. Selain itu pemberdayaan dapat dilihat dari kontrol perempuan terhadap tubuh mereka, dimana kredit mikro berkontribusi terhadap penurunan tindak kekerasan kepada perempuan.
8. Kredit mikro juga dapat membebani para perempuan, karena kredit semacam ini semakin melegitimasi beban ganda perempuan dimana selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, perempuan mempunyai beban untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang seharusnya adalah tanggung jawab kepala keluarga (yaitu suami mereka). Dengan kata lain program seperti kredit mikro ini memfokuskan diri hanya pada satu aspek yaitu problem perempuan untuk mengakses keuangan dan pendapatan keluarga, namun program-program seperti ini lupa untuk mempertimbangkan bagaimana waktu para perempuan telah sedemikian terbatas untuk aktivitas domestik, sehingga semakin memperkuat tripple burden of women, yaitu dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat.

## VI.2. Saran

Agar kredit mikro untuk perempuan dapat mencapai tujuan pemberdayaan perempuan dan lebih lanjut mengentaskan kemiskinan dan tidak sebaliknya membebani para perempuan kelompok sasarannya, maka beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Betapapun banyak hambatan dan kekurangan dalam kredit mikro, program ini tetap adalah upaya atau solusi jangka pendek dan jangka menengah terbaik untuk membantu perempuan yang termarginalisasi, khususnya kelompok perempuan miskin. Hal ini karena program ini sangat berpotensi untuk

mengembangkan kapasitas perempuan untuk bisa mandiri (*self sustainable*). Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, program-program berupa sosialisasi gender harus menjadi prioritas bagi para perempuan maupun para laki-laki berkenaan dengan hak-hak dan kesetaraan relasi gender, sehingga kesetaraan dan keadilan gender dapat benar-benar terwujud. Penyelenggaraan sosialisasi gender ini harus dilakukan baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan. Hal ini karena sosialisasi tentang kesetaraan gender menjadi kunci penting bagi keberhasilan upaya pemberdayaan perempuan. Dengan sosialisasi gender seperti ini maka segala pekerjaan/aktivitas rumah tangga baik yang berhubungan dengan aktivitas domestik maupun aktivitas produktif dan aktivitas sosial tidak terdiktomi secara ekstrim (bahwa perempuan berhubungan dengan aktivitas domestik, sedangkan pria berhubungan dengan aktivitas produktif), namun dilakukan secara bersama oleh suami dan istri, walaupun harus ada pembagian, maka pembagian tersebut disepakati secara bersama oleh suami dan istri dan tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama.

2. Dari semua penjelasan di atas, yang terpenting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan mengadopsi pengertian pemberdayaan (*empowerment*) sebagai "ekspansi dari serangkaian pilihan yang ada untuk perempuan. Dengan mengadopsi definisi ini, jawaban untuk pertanyaan tentang apakah kredit mikro memberdayakan atau sebaliknya justru membebani perempuan akan tergantung sepenuhnya pada pilihan perempuan sebagai individu. Dengan demikian jika seorang perempuan memilih untuk mentransfer

kredit yang diperolehnya, maka dapat dikatakan bahwa perempuan tersebut berdaya karena itulah yang menjadi pilihannya.

3. Kredit mikro akan benar-benar mampu memberdayakan perempuan target groupnya jika diikuti dengan aktivitas lanjutan seperti pendidikan dan pelatihan bagi kelompok sasaran baik tentang manajemen dan pengembangan usaha, penguasaan teknologi tepat guna, jaringan pasar, manajemen dan penguasaan ketrampilan teknis produksi dan lain sejenisnya.
4. Selain itu, penentuan tujuan harus juga menjadi perhatian dalam desain suatu program kredit mikro, sehingga menjadi jelas apakah suatu program kredit mikro harus bertanggung jawab pada pembangunan kapasitas sosial (*social capacity building*), seperti pemberdayaan atau hanya melayani kebutuhan keuangan kelompok miskin yang menjadi target group-nya. Jelasnya jika suatu program kredit mikro hanya bertujuan sebagai institusi finansial untuk memenuhi kebutuhan keuangan kelompok sasarannya, maka tidak perlu memfokuskan diri pada isu sosial yang lebih dalam seperti pemberdayaan, melainkan hanya berfokus pada keberlanjutan finansial (*financial sustainability*). Sebaliknya jika tujuan suatu program kredit mikro adalah untuk membangun kapasitas, maka daripada hanya berkonsentrasi pada aspek ekonomi kemiskinan, program tersebut harus lebih memfokuskan diri pada aspek non ekonomi kemiskinan, seperti upaya-upaya pemberdayaan (seperti melalui pendidikan dan ketrampilan).
5. Berknaan dengan kesimpulan nomor 4 di atas, maka penelitian serupa dengan dukungan sumber daya dana yang lebih besar akan memungkinkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bhatt, Nitin, and Shui-Yan Tang, 2001, "Delivering Microfinance in Developing Countries: Controversies and Policy Perspectives", *Development and Change*, Urbana, 29 (2): 319-334
- Dewayanti, Ratih dan Erna Ermawati Chotim, 2004, *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa*, Yayasan Akatiga, Bandung
- Hunt, Juliet and Nalini Kasyanathan, 2001, "Pathway to Empowerment? Reflection on Microfinance and Transformation in Gender Relations in South East Asia" *Gender and Development*, 9 (1): 42-52
- Jackson, Cecile. 1996. "Rescuing Gender from the Poverty Trap", *World Development*, 26 (3):389-404
- Kabeer, Naila (2001). "Conflicts Over Credit: Re-Evaluating the Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh". *World Development*, 29 (1): 63-84
- Mahmud, Simeen, 2003, "Actually How Empowering in Micro-credit", *Development and Change*, 34(4): 577-605
- Moser, Caroline, 1992. "Third World Policy Approaches to Women in Development" in C. Moser. *Gender Planning and development: Theory, Practice and Training*. London, Routledge pp. 55-79
- Panjaitan, Rosintan D. M. -Drioadisuryo and Kathleen Cloud, 1999, "Gender, self-employment and micro-credit programs An Indonesian case study", *Development and Change*, 30 (2): 769-779
- Pearson, Ruth, 1992, "Gender Matters in Development" in T. Allen and A. Thomas (eds.), *Poverty and Development in the 1990s*. New York, Oxford University Press. pp. 291-311

Rajivan, Anuradha, 2001, "Credit and Women's Empowerment: A Case Study Of SML (SHARE Microfinance Ltd.)", United Nations Development Program (UNDP) DRAF retrieved 1<sup>st</sup> October 2003 from

Remenyi, 2000, "Is There a 'State of The Art' in Microfinance", in Joe Remenyi and Benjamin Quiñones, J.R, *Microfinance and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia and the Pacific*, Pinter, London and New York, pp.25-61

Robinson, Marguerite S. 1997, "Microfinance in Indonesia. (includes related articles on worldwide status of microfinance), *UNESCO Courier*, pp. 24

Rose, Kalima, 1992, *Where Women are Leaders": The SEWA Movement in India*, London: Zed, pp. 15-57

Woller, Garry M. and Warner Woodworth, , "Micro-credit and third world development policy", *Urbana*. 29 (2): 265

Young, Kate, "Planning Development with Women: Making a World Difference, London, Macmillan, pp. 127-147"

Kompas, 27 Februari 2005

Kompas, 07 Maret 2005

Kompas, 14 Maret 2005

Kompas 15 Maret 2005

